
PENYALURAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN MELALUI PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN EKONOMI KELUARGA DI KELURAHAN KUNINGAN

Natasya Zara Zetira¹, Lilis Karwati², dan Nastiti Novitasari³

^{1,2,3}. Jurusan Pendidikan Masyarakat, Universitas Siliwangi
Jl. Siliwangi No.24, Tawang Kota Tasikmalaya

¹natasyzara28@gmail.com, ²liliskarwati@unsil.ac.id, ³nastiti@unsil.ac.id

ABSTRACT

The Family Hope Program is one of the cash assistance programs designed by the government to reduce the level of poverty in Indonesia. This study aims to make researchers understand how the distribution of the family hope program and the aspects fulfilled by the Family Hope Program (PKH) assistance. The method used in this research is qualitative research method. In this study, the subjects studied were PKH assistants and Beneficiary Families (KPM) in Kuningan Village. Data collection techniques in this study used observation, interviews, and documentation. The results of the research in this study are the process of distributing PKH assistance channeled through the channeling bank, namely BNI bank. But for now the distribution of PKH is still changing, PKH distribution is not only channeled through channeling banks but sometimes this distribution is carried out at the sub-district office or local post office. In its distribution, there are often obstacles, namely that PKH assistance is often distributed together with BPNT assistance or other assistance. PKH assistance in Kuningan Village still does not fully meet the economic needs of the family to the fullest. The conclusion is that through the PKH program it is able to increase KPM income and also reduce the expenditure of KPM needs in health and education facilities.

Keywords: PKH Program, Distribution, Social Assistance

ABSTRAK

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program bantuan tunai yang di rancang pemerintah agar mengurangi tingkat keluarga kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan agar peneliti memahami bagaimana penyaluran program keluarga harapan dan aspek yang terpenuhi oleh bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Pada penelitian ini subjek yang diteliti adalah pendamping PKH dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Kuningan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian pada penelitian ini adalah proses penyaluran bantuan PKH disalurkan melalui bank penyalur yaitu bank BNI. Tetapi untuk saat ini penyaluran PKH masih mengalami perubahan, penyaluran PKH tidak hanya disalurkan melalui bank penyalur tetapi terkadang penyaluran ini dilaksanakan di kantor kelurahan atau kantor pos setempat. Dalam penyalurannya pun seringkali mengalami kendala yaitu bantuan PKH tersebut seringkali disalurkan bersamaan dengan bantuan BPNT atau bantuan lainnya. Bantuan PKH di Kelurahan Kuningan memang masih belum memenuhi seluruhnya kebutuhan ekonomi keluarga secara maksimal. Simpulanya melalui program PKH mampu menambah pendapatan KPM dan juga mengurangi pengeluaran kebutuhan KPM dalam pelayanan fasilitas Kesehatan, Pendidikan.

Kata Kunci: Program PKH, Penyaluran, Bantuan Sosial

PENDAHULUAN

Total penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Indonesia menjadi Negara peringkat ke 4 dengan total penduduk terbanyak, dilihat dari laporan Worldmatters pada tahun 2020 tercatat jumlah penduduk di Indonesia mencapai 274,86 juta jiwa per tanggal 14 Desember 2020. Menurut hasil proyeksi penduduk Indonesia dari tahun

2000-2025 akan terus mengalami peningkatan sebesar 24,92%. Jumlah penduduk Indonesia yang besar merupakan sebuah potensi yang harusnya dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia.

Di Indonesia angka kemiskinan merupakan satu indikator yang menggambarkan tingkat kemakmuran penduduknya dan menghambat suatu pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Menurut Yacob (2012) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan salah satu masalah mendasar karena kemiskinan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup yang paling mendasar dan kemiskinan merupakan masalah global karena kemiskinan dihadapi oleh banyak Negara. Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang begitu kompleks dan multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan.

Dalam jurnal *Economics Development Analysis Journal* (2013 : 114) World Bank (2004) menyampaikan bahwa kemiskinan terjadi karena pendapatan yang kurang dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan yang layak, dan pendidikan. Selain itu kemiskinan mengacu pada kesempatan kerja yang kurang dan pada dasarnya orang yang tidak mempunyai pekerjaan yang dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Dalam jurnal *social humaniora Adisasmita* juga menyampaikan (2005) bahwa indikator kemiskinan yang sering digunakan adalah upah, pendapatan, konsumsi, kematian balita, imunisasi, kurang gizi, angka kelahiran, angka kematian, harapan hidup, angka partisipasi sekolah dasar, angka pengeluaran publik untuk pelayanan dasar masyarakat, kebutuhan pangan dan air, pertumbuhan penduduk, pendapatan perkapita, dan distribusi pendapatan. Pada hakikatnya kemiskinan tidak dilihat dari tingkat pendapatan yang rendah dan kesehatan yang buruk, tetapi juga dilihat dari tingkat pendidikan penduduk dan juga perlakuan yang adil di depan hukum dan sebagainya.

Dalam kemiskinan factor yang sangat mempengaruhi yaitu factor sumber daya manusia yang kurang. Hal tersebut di karenakan banyak usia produktif bersekolah tetapi tidak bersekolah. Mereka tidak bersekolah biasanya diakibatkan oleh kendala biaya yang mereka alami sehingga mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan system persekolahan. Hal tersebut yang menyebabkan sumber daya manusia di Indonesia masih sangat sedikit sehingga banyak sekali masyarakat Indonesia yang tidak memiliki keterampilan untuk mereka bekerja. Perlu diadakannya pemilik berdayaan pada masyarakat miskin agar tidak terjadi kesenjangan social yang terus menerus dalam kehidupan social di masyarakat.

Aspek penting dalam mendukung strategi penanggulangan kemiskinan dadalah tersedianya data yang akurat tentang masyarakat miskin. Dengan informasi tersebut, pemerintah dapat dengan mudah mengambil keputusan yang diperlukan untuk mengatasi kemiskinan. Selama ini pemerintahan indonesia telah mencanangkan banyak program untuk mengentaskan kemiskinan saat ini, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH).

Dalam Pedomam Umum PKH 2012 Program Keluarga Harapan merupakan kelompok pertama perlindungan dan dukungan sosial di Indonesia. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program yang memberikan bantuan keuangan kepada rumah tangga sangat miskin (RSTM) karena mereka memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan sumber daya manusia, yaitu pendidikan dan perawatan kesehatan.

Menurut Sarman (2000) Program Keluarga Harapan merupakan prograam kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan masyarakat di Indonesia. Secara umum , konsep politik hampir selalu dikaitkan dengan keputusan tetap yang konsisten dan merupakan pengulangan perilaku yang menyebabkan mereka mengikuti keputusan tersebut.

Program Keluarga Harapan telah berjalan di berbagai Provinsi di Indonesia termasuk Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Kuningan. Pada tahun 2021 setelah meningkatnya masa pandemic Covid 19 ini Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Kuningan sudah mencapai angka 10 ribu keluarga yang di dalamnya termasuk masyarakat miskin dari Kelurahan Kuningan. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kuningan salah satunya dengan adanya sosialisasi kepada tiap ketua RT yang berada di lingkungan Kelurahan Kuningan. Selain itu, ketua RT memberikan rekomendasi kepada Kelurahan mengenai data masyarakat miskin yang dipilih untuk memperoleh bantuan Program Keluarga Harapan tersebut.

Di wilayah Kelurahan Kuningan sendiri Program Keluarga Harapan sudah berjalan sejak kementerian social mengadakan program ini. Namun sayangnya masih banyak keluarga miskin yang kebutuhannya tidak tercukupi meskipun sudah diberi bantuan social. Dengan kondisi seperti sekarang, segala bentuk bahan pokok mengalami kenaikan tidak sebanding dengan bantuan social yang dibagikan oleh pemerintah. Banyak sekali warga miskin mengeluhkan mengenai bantuan social yang tidak bisa menutupi kebutuhan hidupnya. Selain itu, di wilayah kelurahan kuningan masih belum merata mengenai pemberian bantuan kepada masyarakat miskin, cukup banyak masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan social dari program keluarga harapan tersebut.

Selain mengenai bantuan yang diterima tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam pelaksanaannya Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kuningan belum sesuai dengan yang diharapkan. Banyak masyarakat miskin yang sulit memahami bagaimana pelayanan secara administrasi di bidang kesehatan dan pendidikan, sehingga masih banyak sekali masyarakat miskin yang anak anaknya tidak mengikuti pembelajaran di sekolah karena belum memahami bagaimana prosedur untuk pelayanan administrasi Program Keluarga Harapan ini.

METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Kuningan kepada Pendamping PKH dan Keluarga Penerima Manfaat PKH. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) Melalui Pemberian Bantuan Social dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga

Pedoman PKH tahun 2021 menjelaskan penyaluran bantuan sosial PKH disalurkan secara non tunai. Bansos PKH diberikan melalui kartu keluarga sejahtera (KKS) atau tabungan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pembukaan Rekening

Menurut Pasal 2 ayat 12 Peraturan Menteri Sosial tentang keluarga harapan menjelaskan bank yang menyalurkan program PKH adalah bank umum milik negara yang bertidak sebagai mitra pembukaan rekening atas nama penerima bantuan untuk memenuhi dana bansos yang akan disalurkan pada penerima PKH. Berdasarkan hasil penelitian, pembukaan rekening untuk KPM PKH ini diatur langsung oleh pemerintah pusat dengan bank penyalur. Di Kelurahan Kuningan sendiri KPM biasa menarik dana bantuan melalui Bank BNI yang dimana Bank BNI merupakan BUMN yang bermitra dengan pemerintah pusat.

2. Sosialisasi dan Edukasi

Tahapan ini pada mekanisme penyaluran dana bantuan adalah proses dimana pendamping mampu memberikan pemahaman kepada para KPM meliputi hal yang berhubungan dengan bantuan keluarga harapan. Menurut Perpres Nomor 63 Tahun 2017 tentang sistem penyaluran bansos non tunai pada bab 3 mengenai sistem penyaluran dan dinyatakan pada pasal 5 sistem penyaluran yang menjelaskan bahwa pelaksanaan edukasindan sosialisasi dilaksanakan dengan *door to door* kepada keluarga penerima program dengan meakukan pada pertemuan dengan membagikan surat undangan kepada KPM. Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Kuningan biasanya dilakukan oleh pendamping dengan cara berkumpul kediaman anggota kelompok penerima manfaat tersebut. Edukasi pendamping merupakan sebuah tahap yang cukup penting bagi para pendamping di Kelurahan Kuningan, karena pada tahap ini pendamping memberikan pemahan kepada KPM mengenai segala hal tentang PKH dan mengenai tata cara KPM mecairkan dana bantuan PKH.

3. Distribusi KKS pada KPM

KKS adalah Kartu Kesejahteraan Sosial yang saat ini biasanya digunakan untuk para KPM mengambil dan bantuan. KKS diberikan kepada KPM setelah KPM menempuh tahapan pembukaan rekening bank penyalur, karena KKS yang diberikan kepada KPM berupa ATM untuk penarikan dana bantuan tersebut. Sama dengan Perpres RI No. 63 Tahun 2017 mengenai penyaluran bansos nontunai bahwa bank penyalur bertindak sebagai rekan mitra pemerintah yang fungsinya menerima selanjutnya menyalurkan bantuann kepada keluarga penerima PKH yang selanjutnya diberikan pada penerima bansos. Bank penyalur adalah tanda merah yang dipilih sebagai distributor bansos. Dari hasil penelitian bank yang ditujuk di Kelurahan Kuningan adalah Bank BNI. KKS selain dipergunakan untuk menerima bantuan PKH rekening yang digunakan KPM untuk menerima bantuan PKH itupun sama seperti rekening ketika KPM menerima bantuan lain seperti BPNT dan sebagainya.

4. Penyaluran Dana Bantuan

Tahap atau sistem penyaluran dimulai dengan pendistribusian dana bantuan dari pusat sampai kepada KPM yang menjadi penerima. Proses penyaluran bantuan PKH ini bersifat positif karena secara tidak langsung mengajarkan para KPM untuk bisa menabung. jurnal yang disusun oleh Nafizah Hayati (2015) bahwa fasilitas BUMN ini mencapi sinergi dalam penyaluran bantuan program PKH dan ketersediaan layanan pendidikan dan kesehatan bagi penerima bantuan PKH, serta dalam situasi saling mendukung antara UPPKH dan PT. Pos Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian Kelurahan Kuningan biasanya menyalurkan dan bantuan PKH melalui bank penyalur yaitu bank BNI, tetapi saat ini di Kelurahan Kuningan saat ini penyaluran dana bantuan tidak pasti melalui ATM atau rekening penerima PKH, saat ini penyaluran bantuan PKH terkadang melalui kantor Kelurahan/Desa dan juga Kantor Pos Kuningan.

5. Penarikan Dana Bantuan

Dalam Perpres No.63 Tahun 2017 mengenai penyaluran bansos nontunai pada bab 3 tentang mekanisme distribusi yang diuraikan pada Pasal 5 mekanisme distribusi bansos secara non tunai menjelaskan bahwa pencairan bantuan ataupun penggunaan bantuan adalah untuk menutupi kebtuhan sehari-hari baik dengan membeli barang atau jasa atau kebutuhan yang lain. Pasal tersebut juga menjelaskan bahwa mekanisme pengambilan uang dari bank pada penerima merupakan proses atau mekanisme penyaluran bansos yang dapat dilakukan melalui rekening tabungan, ATM , ataupun agen agen tedekat.

Berdasarkan hasil penelitian penarikan uang bantuan biasanya dilaksanakan oleh KPM di ATM bank penyalur yang sudah berkoordinasi dengan pusat. Di Kelurahan Kuningan para KPM biasanya menarik dana bantuan tersebut di ATM dengan bank penyalurnya adalah bank BNI. Namun untuk saat ini para KPM tidak selalu mendapatkan bantuan melalui ATM atau

KKS yang di miliki oleh KPM, saat ini penarikan dana bantuan di Kelurahan Kuningan tidak menentu, terkadang dana bantuan tersebut bisa ditarik di ATM tetapi tidak jarang juga para KPM mengambil dana bantuan tersebut di kantor Kelurahan/Desa dan juga kantor pos setempat.

6. Rekonsiliasi Hasil Penyaluran Dana Bantuan

Rekonsiliasi hasil penyaluran adalah kegiatan pengecekan data penyaluran oleh pendamping PKH terhadap KPM yang telah menerima dana bantuan. Menurut Permensos RI tahun 2018 perihal program PKH dalam pasal 40 menyebutkan rekonsiliasi dari penyaluran bansos PKH sesudah masa panyaluran PKH ketika sudah masuk ke rekening PKH, yang selanjutnya dilakukan rekonsiliasi takni memantau mekanisme penyaluran bansos yang sudah masuk sesuai ke rekening penerima, apakah uangnya di Tarik maupun di tabung dll. Berdasarkan hasil penelitian Rekonsiliasi data di Kelurahan Kuningan rutin dilakukan oleh pendamping PKH untuk melihat dana bantuan PKH ini digunakan atau tidak oleh para KPM. Tetapi untuk saat ini rekonsiliasi dilakukan menggunakan DTKS yang terhubung dengan semua petugas program bantuan PKH.

7. Evaluasi, Pemantauan, dan Pelaporan

Dalam jurnal Dalam Tinjauan Program Evaluasi yang ditulis oleh Dr. Mesiono.,M.Pd (hal 4) evaluasi program merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terarah untuk menentukan seberapa besar tingkat keberhasilan program tersebut. Evaluasi dilakukan oleh pendamping agar pendamping bisa mengetahui sejauh mana keberhasilan pencairan program PKH tersebut. Sedangkan pemantauan dilakukan agar pendamping bisa mengetahui berbagai hal mengenai KPM dan dana bantuan KPM tersebut, setelah itu para pendamping akan melakukan rapat koordinasi bersama dinas sosial kabupaten untuk pelaporan data KPM yang ada. Dalam Permensos RI No.1 tahun 2018 perihal Program PKH pada Pasal 40 menerangkan perihal mekanisme penyaluran bansos PKH yang menjelaskan bahwa evaluasi, pemantauan, dan pelaporan dilakukan secara berkala oleh pendamping sosial PKH. Berdasarkan hasil penelitian Program PKH pada pelaksanaannya di Kelurahan Kuningan berproses dengan baik. Perihal ini bisa dilihat setiap pertemuan antara pendamping dan para KPM. Pendamping dan KPM biasanya melaksanakan pertemuan rutin dalam jangka waktu 3 bulan 1 kali setelah pencairan dana bantuan. Pertemuan ini biasanya dilakukan agar para KPM mampu menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi oleh para KPM kepada pendamping. Selain itu, pertemuan ini dilakukan agar para pendamping mampu melakukan evaluasi terhadap para KPM setelah pencairan dana bantuan. Setelah dilakukannya evaluasi bersama para KPM, pendamping juga melakukan pemantauan secara rutin melalui DTKS bersama dengan pegawai kelurahan/desa dan juga dinas sosial.

Terpenuhinya Berbagai Aspek Kebutuhan KPM PKH.

Dalam jurnalnya Isdijoso, dkk (SMERU, 2016) menyebutkan bahwa Program Keluarga Harapan membantu menutupi biaya pendidikan dan kesehatan, konsumsi, serta kehidupan yang lebih layak.

1. Aspek Ekonomi

Program PKH adalah sebuah program dirancang agar menanggapi permasalahan kemiskinan Indonesia. Para KPM sangat merasakan banyak sekali manfaat yang di dapat setelah KPM mendapatkan bantuan PKH ini. Dalam kajian PKH, Dirjen Anggaran Kemenkeu (2015, hlm.7) menunjukkan bahwa tujuan PKH ialah menurunkan jumlah kemiskinan, memperbaiki dan mengubah kualitas SDM dan perilaku yang tidak berpihak pada kesejahteraan kelompok miskin. Tujuan PKH juga dikemukakan oleh Hasni Hanif (2015) dalam Jurnal yang berjudul "Pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap Kesejahteraan Masyarakat" bahwa PKH bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga KPM melalui akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial serta mengurangi pengeluaran keluarga dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin yang sangat rentan.

Berdasarkan hasil penelitian Di Kelurahan Kuningan KPM sangat terbantu oleh bantuan PKH ini. Beberapa KPM menggunakan uang bantuan ini sebagai modal untuk bisa menghasilkan pendapatan untuk menutupi kebutuhan keluarganya. Pada dasarnya program PKH di Kelurahan Kuningan ini masih belum bisa memenuhi atau menutupi kebutuhan ekonomi dari para KPM, tetapi dengan adanya program PKH ini mampu mengurangi pengeluaran biaya para KPM dan menambah pendapatan KPM tersebut dengan menjadikannya dana bantauan tersebut sebagai modal untuk mendapatkan penghasilan yang lebih layak.

2. Aspek Pendidikan

Komponen Pendidikan dalam program PKH adalah suatu komponen prioritas. Penerima manfaat harus mendaftar pendidikan terdekat. Pada Pedoman PKH (2021, hal 24) menjelaskan bahwa pendidikan terdiri dari anak usia sekolah yang wajib belajar selama 12 tahun, dan wajib mengikuti aktifitas pembelajaran dengan kehadiran paling minimal 85% di hari belajar efektif. Berdasarkan hasil penelitian Di Kelurahan Kuningan para anggota KPM sudah tertib menyekolahkan anak anaknya pada lembaga pendidikan. Dengan bantuan program PKH mampu memunuhi pendidikan bagi para KPM di Kelurahan Kuningan. Para KPM mampu memenuhi kebutuhan Pendidikan seperti membeli buku, tas, sepatu dan sebagainya dengan dana bantuan yang diberikan.

3. Aspek Kesehatan

Program PKH dirancang tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan ekonomi atau memberantas kemiskinan tetapi meningkatkan jaminan Kesehatan untuk para Keluarga Penerima Manfaat. Selain itu, Pedoman Program PKH (2021: hal 24) ibu hamil dan anak ballita (0-6 tahun) wajib mengecek kesehatannya di faskes/ layanan kesehatan sejalan dengan protocol kesehatan yang diajarkan. Berdasarkan hasil penelitian Rutin vaksin kepada fasilitas Kesehatan sudah menjadi kewajiban untuk para KPM di Kelurahan Kuningan baik untuk ibu hamil maupun balita, selain itu para lansia pun sudah mulai rutin memeriksakan kesehatannya di fasilitas Kesehatan terdekat. . Layanan kesehatan yang cukup baik sudah dijalani bagi para KPM PKH Kelurahan Kuningan secara gratis dan pelayanan yang sangat mudah. Ini menjadi factor para KPM rutin memeriksakan kesehatannya. Selain itu, Program Keluarga Harapan mampu memenuhi kebutuhan gizi setiap harinya dengan memakan makanan yang sehat juga bergizi

KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil observasi peneliti, serta berbagai uraian diatas. Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. System penyaluran PKH di Kelurahan Kuningan sejauh ini sudah cukup terlaksana cukup baik sejalan dengan yang sudah di tetapkan pemerintah pusat. Penyaluran program bantuan PKH di Kelurahan Kuningan disalurkan melalui bank penyalur yaitu bank BNI. Tetapi untuk saat ini penyaluran program PKH ini tidak selalu disalurkan melalui bank BNI terkadang program PKH ini disalurkan melalui kantor Kelurahan/Desa ataupun melalui Kantor Pos. Hal ini cukup menjadi kendala bagi pendamping karena penyaluran dana bansos ini bersamaan bantuan BPNT, dimana akan menimbulkan kecemburuan sosial antar KPM PKH.
2. Bantuan program PKH ini cukup berdampak positif bagi penerima manfaat di Kelurahan Kuningan. Bantuan program PKH memang masih belum mencukupi untuk menutupi segala kebutuhan ekonomi tetapi bantuan ini mampu meminimalisir pengeluaran KPM dan juga menambah pendapatan para KPM. Selain berdampak untuk ekonomi para KPM, bantuan program PKH ini juga berdampak untuk Kesehatan dan Pendidikan para KPM PKH. Setelah adanya bantuan program PKH, KPM merasa pelayanan untuk fasilitas Kesehatan dan Pendidikan menjadi lebih baik.

DAFTAR RUJUKAN

1. Adisasmita (2005 *Jurnal Sosial Humaiora*).
2. Dr. Mesiono., M. P. (2017). *Dalam Tinjauan Evaluasi Program*.
3. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. (2015). *Kajian Program Keluarga Harapan*.
4. Habibullah, S. dkk. (2020). *Pemetaan Pendamping dan RELawan Sosial*.
5. Hasni Hanif. (2015). *Pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap Kesejahteraan Masyarakat*.
6. Isdijoso, Widjajanti., Hastuti, M., Mawardi, Sri Budiyati,S.,Rosfadhila,M.,Febriany, V & Sodo, R, J.(2018). Persepsi Penerima Manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan:
7. Kajian Program PKH. (2015). *Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan*.
8. Peraturan Menteri Sosial republik indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan. (2018). *World Development*,
9. Pedoman Pelaksanaan Program PKH. (2021). *Direktorat Jaminan Sosial Keluarga*.
10. Pedoman Pelaksanaan Program PKH. (2012). *Direktorat Jaminan Sosial Keluarga*.
11. Peraturan Presiden Nomor 63 (2017) tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Pemprov DKI Jakarta. (2014). Bantuan Sosial Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011. *Jakarta.Bpk.Go.Id*.
12. Utomo, D., Hakim, A., & Ribawanto, H. (n.d.). PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP RUMAH TANGGA MISKIN (Studi pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri). In *JAP* (Vol. 2, Issue 1).